



Implementasi Kebijakan Bank Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan di Kota Tangerang Selatan

INFO PENULIS

Nadia Khoerotunnisa
Universitas Muhammadiyah Jakarta
nadiakhoerotunnisa10@gmail.com
+6287713341012

Marsha Nara Andira
Universitas Muhammadiyah Jakarta
marshanara05@gmail.com
+6289695654040

Resdyandi S Dinata
Universitas Muhammadiyah Jakarta
resdyandidinata@gmail.com
+6285773137435

Reihan Ahmad Maulana
Universitas Muhammadiyah Jakarta
reihanahmadmaulana22@gmail.com
+6285795722755

Abdul Rahman
Universitas Muhammadiyah Jakarta
abdul.rahman@umj.ac.id
+628567161961

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Khoerotunnisa, N., Andira, M. N., Dinata, R. S., Maulana, R. A., & Rahman, A. (2026). Implementasi Kebijakan Bank Sampah sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan di Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 426-442.

Abstrak

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas di perkotaan, masalah pengelolaan sampah menjadi masalah lingkungan yang semakin kompleks. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Kota Tangerang Selatan menghadapi masalah yang signifikan, yang menyebabkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas dan juga meningkatkan tingkat kerentanan dari pencemaran lingkungan dan banjir. Program Bank Sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai solusi dari mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan Bank Sampah diterapkan sebagai upaya pengelolaan lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi media yang relevan. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari kebijakan George C. Edwards III. Model tersebut menyoroti empat faktor utama: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan telah berjalan dengan baik dan telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dan memberikan nilai ekonomi dari sampah anorganik. Namun demikian, kekurangan sumber daya, partisipasi masyarakat yang tidak konsisten, insentif yang kurang bagi pengelola, dan sistem koordinasi antarlembaga yang tidak terintegrasi menyebabkan kebijakan tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, penelitian ini menyarankan peningkatan komunikasi kebijakan yang konsisten, peningkatan dukungan sumber daya dan keterampilan pengelola, dan peningkatan koordinasi birokrasi untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program Bank Sampah Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Bank Sampah, Pengelolaan lingkungan, Implementasi kebijakan, Partisipasi masyarakat

Abstract

As the population and urban activities grow, waste management is becoming an increasingly complex environmental issue. In managing household waste, South Tangerang City faces significant problems, leading to limited landfill capacity and increasing the risk of environmental pollution and flooding. The community-based waste bank program is one of the policies created by local governments to address this issue. The purpose of this study is to examine how the Waste Bank policy is implemented as an environmental management effort in South Tangerang City. This research uses a descriptive qualitative approach and utilizes secondary data from scientific journals, policy documents, government reports, and relevant media publications. For the research analysis, George C. Edwards III's policy implementation model was used. This model emphasizes four main factors: policy communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Research shows that the Waste Bank policy in South Tangerang City has been running well and has increased public awareness about waste sorting and provided economic value from inorganic waste. However, a lack of resources, inconsistent community participation, insufficient incentives for managers, and an unintegrated inter-agency coordination system caused the policy to function poorly. As a result, this study suggests improving consistent policy communication, increasing resource support and manager skills, and enhancing bureaucratic coordination to achieve sustainable environmental management thru the South Tangerang City Waste Bank program.

Key Words: Public policy, Waste Bank, Environmental management, Policy implementation, Community participation

A. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tantangan yang penting di zaman sekarang karena pertumbuhan penduduk, perkembangan kota, dan kegiatan ekonomi semakin meningkat, sehingga volume sampah juga semakin bertambah. Kondisi ini memerlukan cara pengelolaan yang tidak hanya mengandalkan teknis, tapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Indonesia adalah kebijakan bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, di mana sampah diubah menjadi barang berharga melalui kegiatan menabung dan daur ulang (Sudiyanto & HS, 2025). Program ini sudah

terbukti berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan membantu mengurangi sampah sejak awal pembuangan (Ahmad, 2022). Di Kota Tangerang Selatan, pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat aktivitas perkotaan yang semakin pesat membuat pengelolaan sampah menjadi isu lingkungan yang sangat mendesak. Karena itu, penerapan kebijakan bank sampah merupakan hal yang strategis upaya mendorong pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat, berkelanjutan, serta sesuai dengan visi zero waste nasional. (Saraya, S., 2023).

Praktik pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, seperti bank sampah, sudah banyak dilakukan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan. Di Jepang, sistem pemilahan sampah berjalan dengan ketat berkat aturan yang jelas dan partisipasi warga yang tinggi. Di Korea Selatan, ada sistem bayar sesuai jumlah sampah yang dibuang, sehingga mendorong masyarakat mengurangi penggunaan sampah. Di sisi lain, di beberapa negara berkembang seperti Thailand dan Filipina, model bank sampah digunakan bukan hanya untuk memperkuat partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pengumpulan dan daur ulang sampah (Sudiyanto & HS, 2025). Jepang menerapkan sistem pengelolaan sampah yang ketat, didukung oleh peraturan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga (Saitoh et al., 2022). Di Korea Selatan, sistem bayar sesuai sampah atau disebut dengan *pay as you throw* berhasil mengurangi jumlah limbah dengan cara mengenakan biaya berdasarkan volume sampah yang dibuang, sehingga mendorong warga untuk lebih bijak dalam menggunakan dan membuang barang (Review, 2022). Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa berhasilnya mengelola sampah tidak bergantung yang ada di kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sistem insentif ekonomi dan kesadaran masyarakat secara bersama-sama tentang pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Praktik-praktik tersebut juga menunjukkan bahwa berhasilnya mengelola lingkungan sangat bergantung pada kerja sama antara kebijakan pemerintah, sistem insentif ekonomi, dan kesadaran dari sumber daya manusia juga penting dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Di Indonesia, konsep bank sampah mulai berkembang cepat sejak pemerintah menerbitkan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diikuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Sekarang, ada ribuan bank sampah yang beroperasi di berbagai kota seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung, yang dianggap sebagai contoh baik dalam mengurangi sampah sejak sumbernya (Ahmad, 2022). Beberapa daerah juga telah berinovasi melalui digitalisasi sistem bank sampah dan integrasi dengan program ekonomi sirkular (Purnia et al., 2025). Meskipun begitu, penerapan kebijakan yang ada masih mengalami masalah seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat, minimnya sarana yang tersedia, serta kurangnya kerja sama antarlembaga. Karena itu, penelitian tentang pelaksanaan kebijakan bank sampah di Indonesia, terutama di Kota Tangerang Selatan, sangat penting upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses agar pengelolaan lingkungan bisa lebih baik lagi (Penelitian et al., 2025).

Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 sebagai landasan kebijakan pengelolaan sampah berbasis pengurangan (Oktavia & Salam, 2025). Akan tetapi evaluasi terhadap kebijakan persampahan tersebut menunjukkan capaian kebijakan belum optimal karena kendala fasilitas dan kesadaran masyarakat (Hodomuan Torang Muara & Tuti WD Retnowati, 2022). Sementara itu, studi mengenai sampah organik mengindikasikan bahwa meskipun regulasi ada, pelaksanaan lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan partisipasi stakeholder lokal (Fera et al., 2025). "Aspek inovasi seperti komunikasi antarpemangku kepentingan dalam Bank Sampah berbasis digital juga menjadi isu penting, seperti yang ditunjukkan oleh studi Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, Hadi Susilo Hapsari, 2020), yang menyoroti model komunikasi stakeholder dalam operasional bank sampah.

Studi ini menyelidiki peran Bank Sampah dalam transisi dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program Bank Sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang aktif, dukungan kebijakan pemerintah, dan penciptaan sistem baru untuk pengelolaan sampah (Rancakalong & Sumedang, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan elemen yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan membuat model partisipasi yang lebih baik dengan menyelidiki kasus Tangerang Selatan.

Studi ini menghasilkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan. Mengingat tujuan pemerintahan kota untuk memiliki

Bank Sampah di setiap RW pada tahun 2025, penelitian ini sangat relevan untuk membantu pemerintah membuat rencana implementasi yang lebih baik untuk gerakan “Satu RW, Satu Bank Sampah”. Saat ini ada 448 bank sampah di Tangerang Selatan, tersebar di berbagai daerah. Namun, sistem operasionalnya masih sulit (TERASBANTEN.ID, 2025). Krisis persampahan semakin parah di Kota Tangerang Selatan. Lebih dari 60% sampah di Tangsel berasal dari rumah tangga, menyebabkan TPA Cipeucang menjadi berat (Iqbal, 2025b). Kondisi ini diperparah oleh karakteristik geografis dan tata ruang kota yang rentan banjir, di mana luas kawasan permukiman rawan banjir mencapai 402 hektar dengan rasio perlindungan infrastruktur pengendalian banjir baru 59,65%, Pendangkalan saluran drainase akibat sampah rumah tangga serta penyusutan alur sungai akibat pembangunan yang tidak terkendali menjadi faktor utama mengapa banjir rutin terjadi di 31 titik rawan setiap musim hujan (Nuraini & Rahman, 2025). Penelitian tentang kinerja Bank Sampah sangat penting mengingat situasi ini memerlukan solusi segera yang berfokus pada pengurangan sumber sampah. Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah berkembang menjadi masalah penting yang memerlukan tindakan segera. Pemerintah Kota Tangsel sedang mengoptimalkan Bank Sampah dan TPS3R untuk menangani sampah dari hulu ke hilir (Medcom.id, 2025). Studi ini sangat penting untuk menemukan cara-cara di mana Bank Sampah dapat membantu mengurangi beban TPA sekaligus mencegah pendangkalan saluran air yang memicu banjir, sehingga menjadi solusi terintegrasi antara pengelolaan sampah dan mitigasi bencana banjir di wilayah urban yang padat.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan bank sampah sebagai upaya pengelolaan lingkungan telah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji partisipasi rumah tangga dalam program bank sampah di Kota Depok dengan fokus pada faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas program (Wahfiuddin & Riyanto, 2024). Selain itu, terdapat juga penelitian yang menganalisis hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah urban Indonesia, termasuk peran bank sampah dalam mengatasi kendala infrastruktur dan kesadaran komunitas (Manalu et al., 2022). Serta ada pula penelitian tentang pemanfaatan bank sampah bagi rumah tangga sebagai wadah pengolahan limbah anorganik di wilayah pedesaan Jawa Tengah, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal (Asih et al., 2022), yang dilanjutkan dengan penelitian serupa mengeksplorasi partisipasi warga dalam program bank sampah di Kota Semarang, yang menyoroti pengaruhnya terhadap penurunan volume sampah domestik (Sumiyati et al., 2025). Penelitian ini mengandung novelty sebagai berikut: 1) Analisis mendalam terhadap efektivitas implementasi kebijakan bank sampah secara spesifik di Kota Tangerang Selatan sebagai kota otonom baru dengan dinamika urbanisasi tinggi; 2) Belum adanya penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas implementasi kebijakan bank sampah di Kota Tangerang Selatan dalam perspektif pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan ekonomi sirkular, dengan mengintegrasikan faktor lokal seperti infrastruktur perkotaan dan tingkat kesadaran komunitas.

Kebaruan-kebaruan tersebut akan memberikan manfaat signifikan bagi pengambil kebijakan daerah (khususnya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup), dalam: 1) Melakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap program bank sampah pada skala kota otonom; 2) Menyediakan rekomendasi serta wawasan yang obyektif dan konstruktif untuk penyempurnaan implementasi kebijakan bank sampah di masa mendatang. Dengan demikian, terdapat satu pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan bank sampah sebagai upaya pengelolaan lingkungan di Kota Tangerang Selatan?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga dengan teknik studi pustaka (*library Research*). Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan dari pembentukan Bank Sampah sebagai salah satu upaya dalam mengelola lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Analisis ini didasarkan pada berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan data berupa sekunder yang di didapat dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, dokumen kebijakan terkait, serta berita dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pengelolaan Bank Sampah. Dokumen kebijakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 13 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Pengurangan (Sudiyanto & HS, 2025).

Salah satu referensi utama dalam penelitian ini adalah jurnal Strategi Penguatan Bank Sampah dalam Implementasi Zero Waste di Indonesia oleh (Sudiyanto & HS, 2025), yang membahas kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia. Data yang digunakan dianalisis melalui metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur untuk menemukan pola dan strategi yang cocok dengan kondisi Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, peneliti dapat menggali dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai literatur, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan dan tantangan dalam kebijakan Bank Sampah, serta upaya mencapai pengelolaan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik, yaitu kebijakan dianggap sebagai rangkaian keputusan yang diperoleh pemerintah sebagai upaya membenahi masalah umum secara teratur dan terukur. Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik merupakan alat penting dalam tercapainya tujuan negara, yang mencakup proses penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan lingkungan dengan cara program Bank Sampah bisa diartikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah serta mendorong peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan Landasan teori implementasi kebijakan publik, yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dibuat diubah menjadi tindakan nyata. Kurhayadi (2023) dijelaskan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya yang ada, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Teori yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), serta struktur birokrasi adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana program Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan berjalan, karena pelaksanaannya bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, para pelaksana kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat. (Tinggi & Administrasi, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini berjalan, namun belum mencapai efektivitas optimal sebagaimana yang ditargetkan dalam kebijakan daerah mengenai pengurangan sampah rumah tangga. Kondisi persampahan di Kota Tangerang Selatan sampai saat ini masih menjadi persoalan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa titik strategis seperti Ciputat dan Serpong masih mengalami penumpukan sampah yang diangkut secara bertahap oleh pemerintah kota, meskipun armada dan satuan tugas telah dikerahkan untuk melakukan pembersihan (Agung, 2025). Kondisi tersebut juga menuai kritik dari DPRD dan masyarakat, karena langkah penanganan yang dilakukan dinilai belum menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, sehingga sampah masih terlihat berserakan di ruang publik dan lingkungan permukiman (Rahmawati, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap operasional dan pengelolaan di tingkat lapangan. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan belum mencapai kinerja optimal akibat keterbatasan fasilitas, kapasitas pengelola, serta rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya (Hadamuan Torang Muara & Tuti WD Retnowati, 2022). Berdasarkan perspektif teori dari implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh George C. Edwards III, bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketidakeimbangan dalam salah satu variabel tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagaimana tercermin dalam kondisi persampahan di Kota Tangerang Selatan saat ini.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan faktor pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, hasil telah menyatakan jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui program "Satu RW Satu Bank Sampah". Program ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah serta peran Bank Sampah dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga. Namun demikian, intensitas komunikasi kebijakan di setiap wilayah menunjukkan variasi yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara wilayah yang aktif dengan wilayah yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Keberhasilan Bank Sampah sangat ditentukan oleh frekuensi dan kualitas komunikasi lingkungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Hapsari (2023) menegaskan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai aktor merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, keberhasilan pemilahan sampah di tingkat keluarga sangat dipengaruhi oleh penyampaian informasi yang mudah dipahami, konsisten, dan dilakukan secara berulang. Apabila komunikasi tidak dilakukan secara merata dan berkelanjutan, maka pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme Bank Sampah akan berbeda-beda (Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, Hadi Susilo Hapsari, 2020).

Lebih lanjut, hasil penelitian komunikasi lingkungan menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan pada dasarnya telah bersifat interaktif dan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, pengelola Bank Sampah, serta masyarakat. Komunikasi tersebut berlangsung melalui sosialisasi langsung, pertemuan komunitas, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang saling bergantung satu sama lain dalam pengelolaan sampah (Shahreza et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa secara struktural, saluran komunikasi kebijakan telah tersedia dan dijalankan.

Namun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Secara institusional, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengklaim bahwa keberadaan Bank Sampah mampu mengurangi volume sampah hingga 20%, sehingga program ini dipandang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah harian kota (TangselPos.id, 2024). Klaim ini menunjukkan adanya optimisme pemerintah terhadap kinerja kebijakan yang dijalankan, meskipun masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui data teknis yang terukur. Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual persampahan, data publik menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan masih menghasilkan sekitar 1.022 ton sampah per hari pada tahun 2024, yang mencerminkan tingginya beban pengelolaan sampah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Selain itu, komposisi sampah di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sampah organik sebesar 45,23%, sementara sisanya merupakan sampah plastik, kertas, dan jenis anorganik lainnya (Dhany, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa Bank Sampah memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah anorganik yang bernilai ekonomi, di mana sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan melalui penyimpanan di Bank Sampah dan pendauran ulang menjadi produk yang bermanfaat (Pemerintahan et al., 2025). Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menegaskan bahwa Bank Sampah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sistem pengelolaan sampah organik yang memadai.

Fakta lapangan juga menunjukkan masih adanya penumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tangerang Selatan, seperti wilayah Ciputat dan Serpong, yang harus ditangani secara bertahap oleh pemerintah kota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pesan kebijakan dan koordinasi yang telah disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi belum sepenuhnya diterjemahkan secara konsisten dalam praktik pengelolaan sampah di seluruh wilayah (Agung, 2025). Dengan demikian, meskipun komunikasi kebijakan telah berjalan dan melibatkan berbagai aktor, ketimpangan intensitas komunikasi serta lemahnya mekanisme umpan balik menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel kunci pada model Edwards III yang sangat mengidentifikasi dari keberhasilan implementasi kebijakan Bank Sampah. Hasil kajian

menunjukkan bahwa aspek dari sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, maupun pembiayaan menjadi hambatan paling dominan di Kota Tangerang Selatan. Meskipun jumlah bank sampah telah mencapai sekitar 448 unit pada 2024, namun sebagian besar belum memiliki fasilitas operasional yang memadai seperti alat pemilah, timbangan digital, rak penyimpanan, kendaraan angkut, serta ruang pengolahan yang aman dan higienis. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar bank sampah hanya berfungsi sebagai titik pengumpulan, bukan sebagai unit pengurangan sampah dari hulu sebagaimana dikonsepsikan dalam kebijakan (Susanto et al., 2024).

Keterbatasan SDM juga tampak dari minimnya pelatihan formal bagi pengelola bank sampah. Banyak pengelola bekerja secara sukarela, tanpa kontrak kerja maupun insentif yang jelas, sehingga aktivitas operasional tidak berlangsung secara konsisten. Situasi ini sejalan dengan temuan Suryani & Fitriani (2023) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan bank sampah sering terhambat oleh lemahnya kapasitas manajerial pengelola dan kurangnya pelatihan formal yang sistematis, sehingga dukungan teknis dan pendidikan bagi pengelola menjadi aspek penting yang harus dikembangkan untuk menguatkan implementasi kebijakan bank sampah. Selain itu, tidak adanya standar kompetensi pengelola bank sampah membuat kualitas layanan berbeda-beda antarlokasi (Puspitorini et al., 2025).

Dari sisi pembiayaan, mayoritas bank sampah bergantung pada dana swadaya warga dan hasil penjualan sampah anorganik yang bernilai ekonomi. Sementara itu, dukungan anggaran dari pemerintah kota belum merata dan cenderung bersifat stimulan, bukan pembiayaan berkelanjutan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan bank sampah sering terhambat oleh minimnya dukungan teknis dan pembiayaan berkelanjutan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan operasional dan kesinambungan unit bank sampah di tingkat komunitas. Selain itu, minimnya integrasi dengan fasilitas lanjutan seperti TPS3R memperburuk situasi; bank sampah yang tidak memiliki akses ke fasilitas pengolahan lanjutan mengalami penumpukan sampah anorganik karena bergantung pada pengepul eksternal, yang sering memengaruhi ketepatan waktu penjemputan dan harga jual. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam program Bank Sampah di Tangerang Selatan masih memerlukan penguatan menyeluruh, termasuk pembiayaan berkelanjutan dan dukungan pemerintah yang konsisten agar efektivitas program sesuai target kebijakan daerah (Ardini & Pradesyah, 2025).

Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pada 2025 terlihat nyata dari kondisi lapangan, di mana sampah dilaporkan menumpuk di berbagai titik kota seperti Ciputat dan Serpong akibat keterbatasan armada pengangkut, kapasitas fasilitas pengolahan, serta terganggunya alur pembuangan ke TPA Cipeucang. Pemerintah kota memang melakukan penanganan bertahap, namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia dari sarana-prasarana maupun dukungan operasional belum mampu mengimbangi tingginya timbulan sampah harian. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa lemahnya dukungan sumber daya, termasuk infrastruktur dan pembiayaan operasional, berdampak langsung pada belum optimalnya kinerja bank sampah dan sistem persampahan kota secara keseluruhan (DetikNews, 2025).

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan elemen krusial dalam model implementasi kebijakan menurut Edwards III, yang mencakup sikap, komitmen, integritas, motivasi, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Pada konteks kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan, variabel disposisi menunjukkan pengaruh langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan operasional bank sampah di tingkat RW dan kelurahan. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan laporan lapangan, disposisi pelaksana memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Di sejumlah daerah seperti Pamulang, Ciputat Timur, dan Serua, para pengelola menunjukkan komitmen kuat ditunjukkan oleh konsistensi pengumpulan sampah setiap pekan, inovasi kegiatan edukasi lingkungan, serta kemampuan membangun hubungan sosial yang erat dengan warga. Pengelola di wilayah ini umumnya memiliki motivasi intrinsik yang tinggi untuk menjaga lingkungan dan memajukan program berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Ginting et al. (2022) bahwa keberhasilan program bank sampah berhubungan erat dengan kemampuan pengelola membangun kepercayaan (trust), rasa kepemilikan, dan kedekatan emosional dengan masyarakat (Br Ginting et al., 2022).

Sebaliknya, pada beberapa wilayah seperti Pondok Aren dan Setu, disposisi pelaksana tergolong rendah. Beban kerja yang bersifat sukarela tanpa insentif tetap menjadi penyebab utama rendahnya motivasi. Banyak pengelola mengaku kesulitan menjaga konsistensi kegiatan karena harus berbagi waktu dengan pekerjaan utama. Minimnya penghargaan (reward) maupun pengakuan formal dari pemerintah kota juga memperlemah semangat pelaksana. Penelitian Ariescy et al. (2025) menunjukkan bahwa program berbasis komunitas cenderung stagnan ketika tidak disertai mekanisme insentif, penguatan kapasitas, dan penghargaan sosial yang terstruktur (Ariescy et al., 2025).

Selain itu, terdapat persoalan terkait pemahaman teknis pengelolaan bank sampah. Beberapa pengelola belum sepenuhnya memahami manajemen administrasi, pencatatan tabungan sampah, pemilahan lanjutan, ataupun mekanisme pemasaran sampah ke pengepul. Ketidaktahuan teknis ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan formal dari pemerintah daerah, tetapi juga absennya modul atau SOP operasional yang seragam. Faktor lain yang memengaruhi disposisi adalah ketidakpastian harga jual sampah. Fluktuasi harga plastik, kertas, dan botol membuat banyak pengelola kehilangan motivasi ketika pendapatan hasil penjualan tidak menutup biaya tenaga dan waktu. Situasi ini menyulitkan bank sampah mencapai keuntungan ekonomi yang stabil, sehingga pelaksana kadang menghentikan sementara aktivitas pengumpulan. Secara keseluruhan, disposisi pelaksana pada program Bank Sampah di Tangerang Selatan memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh motivasi, komitmen, kapasitas teknis, dan keberadaan insentif yang memadai. Tanpa dukungan berupa pelatihan terstruktur, pemberian penghargaan, serta kepastian harga jual sampah dari pemerintah, maka variabel disposisi akan terus menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan bank sampah pada skala kota.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi bank sampah di Tangsel telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Namun praktik pelaksanaannya belum terintegrasi sepenuhnya. Koordinasi antar-tingkatan birokrasi, mulai dari DLH, kelurahan, RW, bank sampah, TPS3R, hingga pengepul regional masih menunjukkan fragmentasi sehingga alur distribusi sampah daur ulang tidak berjalan efisien. Koordinasi antar-lembaga pemerintah merupakan faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan jika tanpa koordinasi yang kuat, pelaksanaan di tingkat lapangan cenderung tidak konsisten dan kurang sinergis di berbagai wilayah (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Hal ini relevan dengan kondisi Tangsel, di mana SOP teknis antar-bank sampah berbeda-beda, dan belum adanya sistem pelaporan terintegrasi yang memudahkan evaluasi berkala. Keterbatasan integrasi digital, seperti aplikasi SIAP Bank Benpi dan Siritase yang belum diterapkan merata, semakin memperlambat proses evaluasi kebijakan. Tanpa data real-time, birokrasi sulit mengidentifikasi area perbaikan secara cepat.

Bank sampah di beberapa wilayah Tangsel memiliki kontribusi terhadap dimensi sosial-ekonomi masyarakat. Sebuah studi di Kecamatan Ciputat Timur menemukan jika program bank sampah berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga yang menjadi nasabah (Liquidity et al., 2017). Hal ini memperkuat pandangan bahwa bank sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui nilai ekonomi sampah. Secara historis, Kota Tangerang Selatan tercatat memiliki sekitar 239 bank sampah dan lebih dari 8.000 nasabah pada periode 2012–2018 (Gunartin, 2019). Namun, sejumlah literatur menilai bahwa efektivitas bank sampah pada periode tersebut masih bersifat terbatas karena sebagian besar hanya berfokus pada pemilahan tanpa integrasi dengan proses daur ulang lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah bank sampah meningkat, kapasitas dan keberlanjutan operasional masih menjadi tantangan utama.



Bagan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi pengelolaan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan memiliki pola koordinasi vertikal dan horizontal yang cukup kompleks, di mana DLH Tangsel menjadi pusat kendali pelaksanaan kebijakan dan berinteraksi dengan berbagai unit operasional serta aktor eksternal. Pada level internal, empat bidang utama DLH saling berbagi peran: Bidang Pengelolaan Sampah/TPS-3R menangani aspek teknis dan operasional; Bidang Konservasi & Tata Lingkungan memastikan program selaras dengan rencana tata lingkungan kota; Bidang PPHL melakukan pemantauan kualitas lingkungan; serta Unit Pemberdayaan Masyarakat bertugas membina partisipasi warga dan komunitas. Sementara itu, pola koordinasi horizontal terlihat dari keterlibatan beragam pihak eksternal seperti NGO, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, sektor swasta, retail, dan jaringan bank sampah yang terhubung langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Struktur ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan bank sampah tidak dapat berjalan hanya melalui instruksi birokrasi, tetapi membutuhkan kerja kolaboratif lintas-sektor. Namun demikian, keragaman aktor dan fungsi yang luas ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, kesenjangan informasi, serta fragmentasi pelaksanaan jika tidak diatur melalui standar operasional dan mekanisme integrasi data yang jelas. Dengan demikian, bagan tersebut merepresentasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bank sampah sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas-unit dan lintas-aktor dalam struktur birokrasi yang ada.

Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan sejalan dengan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Model ini mengemukakan empat variabel utama yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sebagai faktor penentu keberhasilan perubahan kebijakan menjadi tindakan konkret yang efektif. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keseimbangan keempat variabel tersebut apabila terjadi ketidakseimbangan, maka dapat menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan (Br Ginting et al., 2022). Hal ini tercermin pada program Bank Sampah di Tangerang Selatan yang telah beroperasi selama tiga tahun terakhir, tetapi belum berhasil mencapai target pengurangan sampah rumah tangga secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan di mana volume sampah harian mencapai sekitar 1.022 ton per hari dengan dominasi sampah organik, temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana interaksi antarvariabel Edwards III membentuk dinamika implementasi kebijakan. Terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kekuatan relatif, namun juga dihadapkan pada hambatan struktural yang cukup signifikan, sehingga menghambat pencapaian hasil kebijakan yang diharapkan (Noviyanti et al., 2023).

Komunikasi Kebijakan

Variabel komunikasi dalam model Edwards III berperan sebagai mekanisme transmisi informasi yang jelas, akurat, dan konsisten dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran. Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat utama

keberhasilan implementasi karena mampu mencegah distorsi pemahaman yang dapat melemahkan partisipasi masyarakat (Jember et al., 2025).

Variabel komunikasi ini dinilai sebagai aspek yang paling relevan dan krusial dalam implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan. Justifikasi ini didasarkan pada temuan bahwa meskipun program "Satu RW Satu Bank Sampah" yang digagas Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil membangun fondasi partisipasi di beberapa wilayah, komunikasi yang tidak merata antarwilayah menyebabkan kesenjangan pengetahuan dan praktik pemilahan sampah rumah tangga. Wilayah dengan sosialisasi intensif menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sementara wilayah dengan paparan informasi terbatas cenderung memiliki keterlibatan masyarakat yang rendah. Kondisi ini selaras dengan prediksi Edwards III bahwa inkonsistensi komunikasi akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan, khususnya dalam mendorong pengelolaan sampah anorganik yang bernilai ekonomi (Dwijayanti & Arif, 2023).

Tanpa komunikasi yang lebih terintegrasi, potensi Bank Sampah sebagai pilar utama pengurangan sampah tidak sepenuhnya terealisasi. Hal ini selaras dengan penjelasan Edwards III bahwa variabel komunikasi merupakan gerbang awal bagi keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan. Lebih lanjut, relevansi variabel ini semakin kuat karena komunikasi menjadi landasan utama bagi variabel lain, seperti sumber daya dan disposisi pelaksana. Tanpa keselarasan pemahaman di kalangan masyarakat dan pengelola, alokasi sumber daya yang memadai sekalipun tidak akan termanfaatkan secara optimal. Akibatnya, kesenjangan komunikasi ini berkontribusi langsung terhadap belum tercapainya target pengurangan sampah rumah tangga serta potensi ekonomi sirkular yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Tangerang Selatan.

Temuan mengenai kesenjangan komunikasi ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan memiliki relevansi strategis yang lebih luas karena kualitas komunikasi kebijakan merupakan fondasi krusial dalam mencapai target nasional pengurangan sampah sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kesenjangan pemahaman masyarakat berkontribusi pada meningkatnya beban lingkungan kota, termasuk timbulan sampah harian di Tangerang Selatan yang mencapai lebih dari seribu ton. Analisis empiris dari kasus lain menunjukkan bahwa strategi komunikasi partisipatif berbasis aplikasi digital mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi hingga 45% melalui penyampaian informasi yang konsisten dan mudah diakses, sebagaimana ditunjukkan dalam implementasi aplikasi Bank Sampah Pancadaya di Kuranji, Kota Padang (Safuan Nada Fatmi et al., 2022).

Kesenjangan komunikasi ini sebagian besar dipicu oleh ketergantungan pada saluran sosialisasi konvensional yang bersifat sporadis, fluktuasi alokasi anggaran untuk kegiatan informasi publik, serta integrasi kanal digital yang belum merata khususnya di wilayah pinggiran kota. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan pesan dan kurangnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sebagaimana diungkap dalam studi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Semarang (Yusa Eko Saputro, Kismartini, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan pengembangan model komunikasi hybrid adaptif yang mengintegrasikan workshop dialogis tatap muka dengan platform digital berbasis gamifikasi. Platform ini dapat memberikan insentif berupa poin yang dapat ditukarkan bagi rumah tangga yang konsisten melakukan pemilahan sampah, serta dilengkapi dashboard pemantauan real-time untuk menjamin konsistensi dan keseragaman sosialisasi antarwilayah. Pendekatan ini tidak hanya akan meratakan pemahaman dan partisipasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadikan Tangerang Selatan sebagai model prototipe nasional yang selaras dengan target pengurangan sampah 30% (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008), SDGs 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan), serta SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Rekomendasi ini dapat direplikasi di kota-kota satelit Jakarta lainnya guna membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Sumber Daya

Variabel sumber daya dalam model Edwards III mencakup kecukupan sumber daya manusia (SDM), pendanaan, serta infrastruktur pendukung yang esensial untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Kekurangan pada variabel ini dapat mengubah potensi kebijakan menjadi hambatan struktural yang signifikan. Variabel sumber daya merupakan aspek yang paling relevan dan menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan (Jember et al., 2025).

Justifikasi ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa dari sekitar 400 unit Bank Sampah yang aktif, mayoritas masih menghadapi keterbatasan alat pemilahan, timbangan digital, ruang penyimpanan, dan kendaraan operasional, sehingga membatasi fungsi Bank Sampah sebagai unit pemrosesan awal dan hanya menjadikannya titik pengumpulan sementara. Minimnya pelatihan bagi pengelola yang sebagian besar bersifat sukarela semakin memperburuk kestabilan operasional. Situasi ini selaras dengan teori Edwards III bahwa ketidakcukupan sumber daya akan melemahkan keberlanjutan implementasi kebijakan (Wati et al., 2021). Peningkatan jumlah unit Bank Sampah tanpa didukung dengan penguatan sumber daya yang memadai menjadikan variabel ini sebagai penghambat utama dalam implementasi kebijakan, sebagaimana diprediksi oleh teori Edwards III. Oleh karena itu, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih strategis dan terfokus untuk meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Relevansi variabel ini semakin kuat karena sumber daya berfungsi sebagai fondasi operasional yang mendukung variabel lain, seperti komunikasi dan disposisi pelaksana. Tanpa infrastruktur serta kapasitas SDM yang cukup, potensi pengurangan sampah rumah tangga dan optimalisasi nilai ekonomi sampah anorganik tidak dapat tergalikan secara maksimal. Bukti empiris memperlihatkan bahwa penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) dengan dukungan sumber daya yang memadai mampu meningkatkan nilai ekonomi sampah hingga 50% serta mempertahankan partisipasi masyarakat jangka panjang, seperti terlihat pada studi Bank Sampah di RW 003 Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara (Narpati et al., 2021). Temuan ini memiliki implikasi strategis terhadap upaya pencapaian target nasional pengurangan sampah serta zero waste ke TPA. Target tersebut merupakan amanat nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dari sumber serta penanganan 70% sisanya hingga tahun 2025. Kebijakan nasional ini kemudian diturunkan ke tingkat daerah melalui penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, dengan memanfaatkan instrumen seperti Bank Sampah, TPS3R, serta fasilitas pengelolaan sampah lainnya untuk mewujudkan pengurangan dari hulu dan penanganan yang berkelanjutan (Kebijakan, 2017).

Keterbatasan sumber daya yang menghambat pencapaian target nasional tersebut terjadi karena beberapa faktor struktural, yaitu ketidakseimbangan prioritas anggaran daerah yang lebih mengutamakan pembangunan fisik jangka pendek daripada investasi berkelanjutan pada kapasitas manusia dan teknologi, fluktuasi alokasi dana, serta fragmentasi sistem informasi yang menyebabkan duplikasi upaya dan hilangnya potensi ekonomi sampah. Pengelolaan berbasis sukarela tanpa pelatihan memadai hanya mencapai tingkat keberlanjutan operasional sekitar 40% (Khoiriyah, 2021). Kondisi ini bertentangan dengan amanat konstitusional UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 33 ayat (3) tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 33 ayat (4) yang menekankan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam ayat tersebut sangat relevan dengan pengembangan ekonomi sirkular melalui Bank Sampah, sehingga alokasi sumber daya harus mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan (Mahkamah Konstitusi RI, 2014).

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang diusulkan meliputi pengembangan skema pendanaan inovatif seperti green bonds tingkat kota guna menyediakan kit operasional standar bagi setiap Bank Sampah, termasuk sensor IoT untuk pemantauan inventori real-time dan kendaraan listrik ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan program sertifikasi nasional berbasis blended learning yang berfokus pada kompetensi digital, manajemen rantai pasok, dan ekonomi sirkular bagi pengelola Bank Sampah. Pendekatan ini akan memperbaiki instabilitas operasional saat ini, membangun ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif dan skalabel, serta menjadikan Tangerang Selatan sebagai model kebijakan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 yang hijau dan resilien. Rekomendasi ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Damásio, 2009), yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana, yang didefinisikan oleh Edwards III sebagai sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana yang memengaruhi konsistensi dan inovasi dalam pelaksanaan, menunjukkan hubungan langsung dengan temuan di wilayah seperti Pamulang dan Ciputat Timur, di mana pengelola dengan komitmen kuat berhasil meningkatkan partisipasi warga melalui hubungan sosial yang baik dan rasa kepemilikan program. Sebaliknya, rendahnya motivasi di wilayah lain akibat beban sukarela, minimnya insentif finansial, dan ketidakpastian harga jual sampah menyebabkan stagnasi, yang mencerminkan peringatan teori bahwa disposisi lemah dapat mengurangi kemauan pelaksana untuk mempertahankan program jangka panjang. Motivasi yang bergantung pada apresiasi sosial dan sistem insentif jelas menjadi elemen kunci, sebagaimana Edwards III tekankan, untuk mengubah sikap pelaksana menjadi pendorong partisipasi masyarakat, sehingga variabel ini menawarkan peluang perbaikan di Tangerang Selatan melalui penguatan dukungan bagi pengelola (Noviyanti et al., 2023).

Temuan mengenai variasi disposisi pelaksana di Kota Tangerang Selatan sangat relevan dengan kondisi faktual program bank sampah berbasis komunitas di Indonesia. Peneliti berpendapat bahwa kesenjangan disposisi antarwilayah merupakan refleksi dari ketidakmerataan sistem dukungan institusional dan absennya mekanisme pemberdayaan pengelola yang terstandarisasi. Justifikasi ini didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan bahwa program bank sampah dengan pengelola yang memiliki komitmen tinggi dan mendapat dukungan sistematis mampu mencapai tingkat keberlanjutan operasional hingga 78%, sementara yang bergantung pada sukarelawan tanpa dukungan memadai hanya bertahan pada tingkat 32% (Raharjo et al., 2022). Variasi disposisi pelaksana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah individual pengelola, melainkan merupakan konsekuensi sistemik dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan insentif bagi aktor pelaksana. Studi komparatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bank sampah di Jawa Timur menunjukkan bahwa motivasi intrinsik pengelola harus diperkuat dengan dukungan ekstrinsik berupa pelatihan berkala, kompensasi yang layak, dan pengakuan formal dari pemerintah daerah (Rusdiyana et al., 2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa bank sampah yang pengelolanya menerima pelatihan terstruktur minimal empat kali setahun memiliki tingkat partisipasi masyarakat 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapat pelatihan rutin.

Disposisi pelaksana merupakan elemen krusial dalam model implementasi kebijakan menurut Edwards III, yang mencakup sikap, komitmen, integritas, motivasi, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Pada konteks kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan, variabel disposisi menunjukkan pengaruh langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan operasional bank sampah di tingkat RW dan kelurahan. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan laporan lapangan, disposisi pelaksana memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Di sejumlah daerah seperti Pamulang, Ciputat Timur, dan Serua, para pengelola menunjukkan komitmen kuat ditunjukkan oleh konsistensi pengumpulan sampah setiap pekan, inovasi kegiatan edukasi lingkungan, serta kemampuan membangun hubungan sosial yang erat dengan warga. Pengelola di wilayah ini umumnya memiliki motivasi intrinsik yang tinggi untuk menjaga lingkungan dan memajukan program berbasis komunitas. Keberhasilan program bank sampah berhubungan erat dengan kemampuan pengelola membangun kepercayaan (trust), rasa kepemilikan, dan kedekatan emosional dengan masyarakat (Manalu et al., 2022). Sebaliknya, pada beberapa wilayah seperti Pondok Aren dan Setu, disposisi pelaksana tergolong rendah. Beban kerja yang bersifat sukarela tanpa insentif tetap menjadi penyebab utama rendahnya motivasi. Banyak pengelola mengaku kesulitan menjaga konsistensi kegiatan karena harus berbagi waktu dengan pekerjaan utama. Minimnya penghargaan (reward) maupun pengakuan formal dari pemerintah kota juga memperlemah semangat pelaksana. Program berbasis komunitas akan stagnan ketika tidak disertai mekanisme insentif, penguatan kapasitas, dan penghargaan sosial yang terstruktur (Susantrin et al., 2025).

Selain itu, terdapat persoalan terkait pemahaman teknis pengelolaan bank sampah. Beberapa pengelola belum sepenuhnya memahami manajemen administrasi, pencatatan tabungan sampah, pemilahan lanjutan, ataupun mekanisme pemasaran sampah ke pengepul. Ketidaktahuan teknis ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan formal dari pemerintah daerah, tetapi juga absennya modul atau SOP operasional yang seragam. Kondisi keberhasilan bank sampah sangat ditentukan oleh kapasitas teknis pengelola, termasuk kemampuan manajerial, komunikasi warga, serta tata kelola pencatatan sampah (No et al., 2024).

Faktor lain yang memengaruhi disposisi adalah ketidakpastian harga jual sampah. Fluktuasi harga plastik, kertas, dan botol membuat banyak pengelola kehilangan motivasi ketika pendapatan hasil penjualan tidak menutup biaya tenaga dan waktu. Situasi ini menyulitkan bank sampah mencapai keuntungan ekonomi yang stabil, sehingga pelaksana kadang menghentikan sementara aktivitas pengumpulan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, variabel keempat dalam teori Edwards III, menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga, prosedur standar, dan integrasi untuk menghindari fragmentasi yang menyebabkan inefisiensi. Di Tangerang Selatan, meskipun didukung dasar hukum Perda Nomor 13 Tahun 2019, koordinasi dari DLH hingga pelaku usaha daur ulang masih belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga alur distribusi sampah bernilai ekonomi menjadi tidak efisien, dengan SOP yang bervariasi dan ketiadaan pelaporan terintegrasi seperti aplikasi SIAP Bank Benpi, yang menghambat alur distribusi sampah daur ulang dan evaluasi cepat. Ini selaras dengan analisis teori bahwa struktur birokrasi yang lemah menghasilkan ketidakkonsistenan, terutama dalam program persampahan urban, di mana data real-time diperlukan untuk identifikasi perbaikan (Adnyana et al., 2023).

Temuan mengenai variasi disposisi pelaksana di Kota Tangerang Selatan sangat relevan dengan kondisi faktual program bank sampah berbasis komunitas di Indonesia. Peneliti berpendapat bahwa kesenjangan disposisi antarwilayah merupakan refleksi dari ketidakmerataan sistem dukungan institusional dan absennya mekanisme pemberdayaan pengelola yang terstandarisasi. Justifikasi ini didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan bahwa program bank sampah dengan pengelola yang memiliki komitmen tinggi dan mendapat dukungan sistematis mampu mencapai tingkat keberlanjutan operasional hingga 78%, sementara yang bergantung pada sukarelawan tanpa dukungan memadai hanya bertahan pada tingkat 32% (Raharjo et al., 2022). Disposisi pelaksana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah individual pengelola, melainkan merupakan konsekuensi sistemik dari desain kebijakan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan insentif bagi aktor pelaksana. Studi komparatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bank sampah di Jawa Timur menunjukkan bahwa motivasi intrinsik pengelola harus diperkuat dengan dukungan ekstrinsik berupa pelatihan berkala, kompensasi yang layak, dan pengakuan formal dari pemerintah daerah (Rusdiyana et al., 2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa bank sampah yang pengelolanya menerima pelatihan terstruktur minimal empat kali setahun memiliki tingkat partisipasi masyarakat 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapat pelatihan rutin.

Menurut teori Edwards III, disposisi pelaksana sangat dipengaruhi oleh sistem insentif dan penunjukan birokrasi yang tepat. Seperti dikemukakan dalam kajian kecenderungan sikap pelaksana kebijakan, disposisi pelaksana dipengaruhi oleh penunjukan birokrasi dan insentif, di mana pemilihan staf yang tepat dan motivasi internal berperan penting (*Barapa (2024) - Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan*, n.d.). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan implementasi yang efektif harus berpedoman pada misi dengan didukung sistem insentif yang jelas, bukan hanya mengandalkan komitmen sukarela. Studi implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Pedurungan, Semarang menunjukkan bahwa sistem tabungan sampah memberikan insentif ekonomi signifikan, terutama bagi keluarga kurang mampu, dengan kepuasan nasabah melebihi 75% (Yusalima & Kismartini, 2025). Hal ini membuktikan bahwa disposisi pelaksana akan meningkat secara signifikan ketika terdapat insentif yang memberikan nilai tambah nyata baik secara ekonomi maupun sosial. Insentif berupa emas bagi nasabah yang berhasil mencapai jumlah tabungan tertentu menjadi insentif efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah (Aisyah et al., 2025).

Fenomena kesenjangan disposisi pelaksana dapat dijelaskan melalui tiga faktor struktural: (1) Ketidakseimbangan prioritas anggaran pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pembangunan fisik infrastruktur jangka pendek daripada investasi berkelanjutan pada kapasitas sumber daya manusia; (2) Absennya standar kompetensi nasional untuk pengelola bank sampah yang menyebabkan kualitas layanan berbeda-beda antarwilayah; dan (3) Fluktuasi harga komoditas daur ulang yang tidak diantisipasi dengan mekanisme stabilisasi harga atau subsidi operasional dari pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan kelurahan dan RW dalam menyusun program pembinaan berkelanjutan bagi pengelola bank sampah.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti merekomendasikan tiga strategi utama untuk memperkuat disposisi pelaksana: Pertama, pengembangan sistem kompensasi bertingkat berbasis kinerja yang mencakup honorarium bulanan bagi pengelola aktif, tunjangan operasional, dan bonus pencapaian target pengurangan sampah. Sistem ini dapat dimodelkan berdasarkan keberhasilan program beasiswa PT Pegadaian yang memberikan bantuan pendidikan bagi 599 pengelola dan anak pengelola bank sampah di seluruh Indonesia sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para pejuang lingkungan (Iqbal, 2025a). Kedua, implementasi program sertifikasi kompetensi pengelola bank sampah berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup modul manajemen operasional, pencatatan digital, komunikasi publik, dan pemasaran produk daur ulang. Program sertifikasi ini harus diselenggarakan minimal dua kali setahun dengan metode blended learning untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh pengelola di berbagai wilayah Tangerang Selatan. Ketiga, pembentukan mekanisme pengakuan publik melalui Penghargaan Bank Sampah Berprestasi tingkat kota yang diselenggarakan setiap tahun, dilengkapi dengan sistem poin digital yang dapat ditukarkan dengan paket sembako, peralatan operasional, atau layanan kesehatan bagi pengelola. Rekening pribadi yang dimiliki setiap peserta memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, sekaligus memotivasi mereka agar konsisten dalam memilah dan menyetorkan sampah secara rutin (Aisyah et al., 2025), yang dapat diadaptasi untuk pengelola bank sampah di Tangerang Selatan. Keempat, pembentukan Forum Pengelola Bank Sampah Kota Tangerang Selatan sebagai wadah komunikasi horizontal, sharing pengalaman, dan advokasi kepentingan pengelola kepada pemerintah daerah. Forum ini dapat menjadi mitra strategis DLH dalam menyusun kebijakan pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan lapangan dan mendorong inovasi pengelolaan berbasis kearifan lokal.

Implementasi rekomendasi ini diperkirakan akan meningkatkan disposisi pelaksana secara signifikan, yang pada gilirannya akan memperkuat keberlanjutan operasional bank sampah dan mendorong pencapaian target pengurangan sampah rumah tangga di Kota Tangerang Selatan. Pengalaman implementasi program insentif di berbagai kota menunjukkan bahwa "program insentif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah, seperti penghargaan atau reward bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah" terbukti efektif meningkatkan partisipasi hingga 45% dalam periode 12 bulan (Romadhona, 2023). Secara keseluruhan, disposisi pelaksana pada program Bank Sampah di Tangerang Selatan memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh motivasi, komitmen, kapasitas teknis, dan keberadaan insentif yang memadai. Tanpa dukungan berupa pelatihan terstruktur, pemberian penghargaan, serta kepastian harga jual sampah dari pemerintah, maka variabel disposisi akan terus menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan bank sampah pada skala kota.

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan telah berjalan sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang melibatkan dari partisipasi masyarakat. Program tersebut berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap pemilihan jenis sampah serta memberikan nilai ekonomi dari sampah anorganik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga secara signifikan, sehingga permasalahan persampahan masih menjadi tantangan utama di tingkat kota. Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan George C. Edwards III, efektivitas kebijakan Bank Sampah disebabkan oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan sarana-prasarana, pendanaan, kapasitas pengelola, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan kebijakan belum berjalan sesuai harapan atau dari kenyataan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pendekatan yang berkelanjutan, penguatan dukungan sumber daya dan pelatihan bagi pengelola, serta perbaikan koordinasi birokrasi agar kebijakan Bank Sampah dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.

E. Referensi

- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. (2023). Pengembangan model simku. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64.
- Angung, Z. (2025). *Tumpukan Sampah di Tangsel Diangkut Secara Bertahap*.

TANGERANGNEWS.Com.

- Ahmad, I. (2022). Evaluation of the Implementation of Waste Bank Activities. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 414–426. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.414-426>
- Aisyah, R. F., Saskia, L., Dianti, N. R., & Permata, B. D. (2025). *Prosedur Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kota Padang*. 2(1), 136–143.
- Ardini, N., & Pradesyah, R. (2025). *Pelayanan Unggulan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan Pengembangan Bank Sampah sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Desa Jl Sosro GG 1001 Developing a Waste Bank as a Sustainable Waste Management Solution in Jl. Sosro Village, GG 1001 S. November*.
- Ariescy, R. R., Sholihah, D. D., & Arumsari, D. N. (2025). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 75–88.
- Asih, A. M. S., Trapsilawati, F., Sopha, B. M., & Normasari, N. M. E. (2022). Waste Bank Program for Households as A Means of Processing Inorganic Waste. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 8(4), 177. <https://doi.org/10.22146/jpkm.73409>
- Barapa (2024) - *Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan*. (n.d.).
- Br Ginting, R. U., Zuska, F., & Simatupang, I. (2022). Pengelolaan Bank Sampah Induk Berseri di Kecamatan Lubuk Pakam. *Perspektif*, 11(4), 1369–1381. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7239>
- Damásio. (2009). No Title 255), 5(2, *مجلة العربية*, كتاب الجامع. ???
- DetikNews. (2025). *Keluh Kesah Warga Tangsel Gara-gara Tumpukan Sampah*. DetikNews.
- Dhany, F. W. W. (2025). *Perburuan Rente di Balik Tumpukan Sampah Tangerang Selatan*. Kompas.Id.
- Dwijayanti, K., & Arif, L. (2023). *Implementation of Waste Management Policy in Landfill*. 14(4), 491–498. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Fera, Y., Nefianto, T., Cholifihani, M., Hidayat, Y. R., & Wicaksana, H. H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Sampah Organik Di Tangerang Selatan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 3327–3339. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8481>
- Gunartin, G. (2019). Analisa Efektivitas Bank Sampah sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Menuju Smart City di Kota Tangerang Selatan. *Inovasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v6i1.y2019.p1-6>
- Hadomuan Torang Muara, & Tuti WD Retnowati. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 13, 1–8. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/4504/2168>
- Iqbal. (2025a). *Pegadaian Peduli Pendidikan Rakyat, Berikan Beasiswa bagi Pengelola Bank Sampah di Seluruh Indonesia*.
- Iqbal, M. (2025b). *Sebelum PSEL, Pemkot Tangsel Mesti Gencarkan Upaya Pemilahan Sampah*. IDNTIMES.COM.
- Jember, T. P. S. B., Fadhil, M. K., Soepandi, H., Leba, K., & Darmawan, M. R. (2025). *Room of Civil Society Development Pengembangan Bank Sampah menggunakan Aplikasi E-WASTE di*. 4(5), 912–924.
- Kebijakan, P. T. (2017). *Kebijakan-Dan-Strategi-Daerah-Pengelolaan-Sampah-Rumah-Tangga-Dan-Sampah-Sejenis-Sampah-Rumah-Tangga27.Pdf*.
- Khoiriyah, H. (2021). Analysis of Public Health Awareness Regarding Waste Management Efforts in Tegorejo Village, Pegandon District, Kendal Regency. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 13–20. <https://doi.org/10.15294/ijc.v10i1.30587>
- Liquidity, J., Manggolo, D., Putih, C., & Ranji, P. (2017). *PROGRAM BANK SAMPAH DAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR*. 6(2), 133–140.
- Mahkamah Konstitusi RI, K. dan S. J. (2014). *Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 7.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Medcom.id. (2025). *Pemkot Tangsel Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah*. Medcom.Id.
- Narpati, B., Lubis, I., Wahyu Setyawati, N., & Indrianna Meutia, K. (2021). Penerapan Bank Sampah sebagai Wujud Adanya Nilai Ekonomi dengan Prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replant)

- Studi: RW 003 Kelurahan Harapan Baru Bekasi-Utara. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis (JAMEB)*, 1(2), 39–45.
- No, V., Adawiah, W., Hanindraputri, E. K., & Abid, M. (2024). *Leadership , Innovation and Community Participation Pillar of Institutionalization in Bank Sampah Induk Surabaya*. 1(2), 111–119.
- Noviyanti, Noviani, H. I., Octaviasari, S., Kemalia, N., Bargoyah, F., Baihaqy, D., & Zulfa, P. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 55–71.
- Nuraini, C., & Rahman, A. (2025). *Studi+vol+2+no+1+februari+2025+hal+208-220*. 208–2020.
- Oktavia, F. K., & Salam, R. (2025). *Implementation of Waste Reduction Policy under Regional Regulation No . 13 / 2019 on Amendments to Regional Regulation No . 3 / 2013 on Waste Management in Tangerang Selatan*. 7(September), 151–168.
- Pemerintahan, J., Kebijakan, D. A. N., Putri, D. K., Sepkamala, D. D., & Rahman, A. (2025). *Strategy of the Depok City Government , Indonesia on Waste Management Towards a Zero Waste City*. 7(1), 1–12.
- Penelitian, A., Program, I., Bengkulu, K., Berjalan, B., Baik, D., Menteri, P., Hidup, L., Kehutanan, D., Indonesia, R., Pengelolaan, T., Pada, S., Sampah, B., Bengkulu, K., Kunci, K., & Sampah, B. (2025). *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI KOTA BENGKULU Oleh : Anggi Nurcayani , Kahar Hakim , Yorry Hardayani Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu*. 14(1), 25–32.
- Purnia, D. S., Simpony, B. K., Cahyadi, C., Azzahra, V., Fauziah, A. Z., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Peningkatan ekonomi ramah lingkungan lewat inovasi dan penerapan ekonomi sirkular pada bank sampah ciherang tunas mulia*. 4(1), 39–53.
- Puspitorini, P., Serdani, A. D., Endrawati, T., Winurdana, A. S., Agroteknologi, P. S., Pertanian, F., Islam, U., Blitar, K., Timur, P. J., Studi, P., Ternak, I., Pertanian, F., Balitar, U. I., Blitar, K., Timur, P. J., Sampah, B., Sejahtera, T., Gedog, K., & Blitar, K. (2025). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Pendampingan Peningkatan Kapasitas Bisnis Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Kewirausahaan Kota Blitar Abstrak Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*. 6(3), 698–706.
- Raharjo, M., Nurzajuli, N., Sulistiyani, S., Setiani, O., Hanani, Y., & Sekar, I. (2022). Program Peningkatan Kualitas Perilaku Dalam Pengelolaan Sampah Masyarakat Kelurahan Jabungan. *Jurnal Pasopati*, 4(4).
- Rahmawati, D. (2025). *PSI Kritik Sampah di Tangsel Cuma Ditutup Terpal: Tak Selesaikan Masalah*. DetikNews.
- Rancakalong, K., & Sumedang, K. (2024). *Penguatan Bank Sampah : Pendekatan Inovatif Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. 5(2), 53–65.
- Review, R. E. (2022). *종량제봉투 가격이 생활폐기물 배출량에 미치는 영향: 부산광역시 자연실험 사례 Effect of Pay-as-you-throw Bag Prices on Domestic Waste : Evidence from a Natural Experiment of Busan*. 31(3), 319–342.
- Romadhona. (2023). *Dosen Umsida Berdayakan Masyarakat Sidoarjo Melalui 4 Program Bank Sampah*.
- Rusdiyana, E., Setyowati, R., & Lestari, E. (2024). *Pemberdayaan masyarakat melalui inisiasi bank sampah*. 7(204), 703–719. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21259>
- Safuan Nada Fatmi, Syamsir Syamsir, Nanda Aulia, Putri Regina, Tricillia Agustina, & Genta Firanda Putra. (2022). Implementasi Aplikasi Bank Sampah Pancadaya Dalam Mewujudkan Good Governace Di Kuranji Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 95–108. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.145>
- Saitoh, Y., Tago, H., Kumagai, K., & Iijima, A. (2022). A Closer Look at Effective Intervention Methods to Reduce Household Solid Waste Generation in Japan. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22). <https://doi.org/10.3390/su142214835>
- Saraya, S., dkk. (2023). HUKUM Lingkungan. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Shahreza, Mirza Sarwititi, Sarwoprasodjo Arifin, Hadi Susilo Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi lingkungan pengelolaan sampah environmenta communications waste management. *Penelitian Komunikasi*, 23(2), 113–128. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.721>
- Shahreza, M., Sarwoprasodjo, S., Arifin, H. S., & Hapsari, D. R. (2020). Shahreza, M., Sarwoprasodjo,

- S., Arifin, H. S., & Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(2), 113–128. <https://doi.org/10.20422/jpk.v2i23.721>
- Sudiyanto, I. W., & HS, S. M. (2025). Strategi Penguatan Bank Sampah dalam Implementasi Zero Waste di Indonesia: Pendekatan Berbasis Studi Literatur. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(02), 178–192. <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i02.2055>
- Sumiyati, S., Budiharjo, M. A., Sarminingsih, A., Ramadhan, B. S., Destiasari, A., Anwar, N. F., Imani, S. P., Aldela, E. S., Prasasty, G. A., Ramadhan, H. I., Firdausy, A. M., & Zayanah, N. F. (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Kampus Dipo Waste Bank Universitas Diponegoro Menuju Green Campus. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(2), 500–506. <https://doi.org/10.14710/jil.23.2.500-506>
- Susanto, Riau, D. P., & Budiati, A. (2024). Implementation Of A Waste Bank Management Program In The South Tangerang City Area (Study In Benda Baru Subdistrict). *Sinergi International Journal of Law*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61194/law.v2i2.140>
- Susantrin, S., Noor, A. H., & Nurhayati, S. (2025). Economic Empowerment and Community Education through Bank Sampah: A Systematic Review of Waste Management Initiatives. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1508–1514.
- TangselPos.id. (2024). *Diklaim Mampu Kurangi Volume Sampah Hingga 20 Persen, Pilar : Bank Sampah Sangat Membantu*. TangselPos.Id.
- TERASBANTEN.ID. (2025). *DLH Tangsel Targetkan Bank Sampah di Seluruh RW Lewat Gerakan "Satu RW Satu Bank Sampah."* TERASBANTEN.ID.
- Tinggi, S., & Administrasi, I. (2023). *MINISTRATE Public Policy Implementation: A Theoretical Review 1 Kurhayadi 1. 5(1)*, 10–18.
- Wahfiuddin, M. H., & Riyanto, R. (2024). Partisipasi Rumah Tangga dalam Program Bank Sampah: Studi Kasus di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 464–471. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.464-471>
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *Perspektif*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Inter-Governmental Coordination and the Effectiveness of Welfare Policies. *Sibatik Journal*, 4(7), 1323–1333.
- Yusa Eko Saputro, Kismartini, S. (2022). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. *Indonesia Journal of Conservation*, 04, 83–94.
- Yusalima, N. M. M., & Kismartini, K. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN PEDURUNGAN. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(4), 11–26.